

**PERANAN BHAYANGKARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN
MASYARAKAT DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN KEAMANAN
MASYARAKAT DI POLSEK SUMOROTO KABUPATEN PONOROGO**

Oleh

Nofta Wulan Sari¹; Winarti²; Joko Suranto³

Abstract

Research do by researchers aims to understand the role of BHABINKAMTIBMAS In improving security services In the precinct Sumoroto Kabupaten Ponorogo. Mean the role of BHABINKAMTIBMAS in this research was all activity and activities was in line with duty, basic function and authority in achieving its objectives organization of BHABINKAMTIBMAS Is to achieve situation KAMTIBMAS (a security and public order) steady and dynamic. To know benchmark the role of BHABINKAMTIBMAS in the precinct Sumoroto that focuses on increased servant security can be measured of various indicators. Indicators are: the role of BHABINKAMTIBMAS as figurehead, the role of BHABINKAMTIBMAS as leader (leader, the role of BHABINKAMTIBMAS as the officials intermediaries) liasion manager. In this research methods used by researchers is descriptive qualitative. The data collected in this research collected by interviews directly then the result is collected and analysed qualitatively to get data descriptive. After do it data analysis, obtained the result that of various the indicators used in general the results show that the role of BHABINKAMTIBMAS in the precinct Sumoroto Kabupaten Ponorogo already run its work well and effective. It has been proven the research that has been done in the district police station Sumoroto Kabupaten Ponorogo.

Keywords: Role; security; services

Pendahuluan

Dimasa sekarang ini tingkat kejahatan semakin bertambah dan berbanding berbalik dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang menurun dilingkungan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat yang terdapat dalam Undang-undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri adalah bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok Polri. Setiap masyarakat memiliki karakteristik yang beragam budaya dan masalah, yang dapat menyebabkan ketidakcocokan antara komunitas yang satu dengan komunitas yang lain. Angka kriminalitas yang tinggi membuat pelayanan

keamanan lingkungan untuk ditingkatkan, tindak kriminalitas tersebut adalah curanmor 59 kasus, penganiyaan 22 kasus, pembunuhan 3 kasus, pembakaran 22 kasus, narkoba 9 kasus semua pada kasus di tahun 2015 Di Kabupaten Ponorogo. Seperti contoh komunitas anak muda yang tidak suka dengan tukang ojek yang sering mangkal di wilayah komunitas anak muda tersebut. Pada situasi dan kondisi seperti inilah dimana dibutuhkan kehadiran polisi untuk menjembatani konflik yang terjadi diantara komunitas yang berkepentingan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat membutuhkan polisi sedangkan polisi tanpa masyarakat bukan apa-apa. Untuk itu pentingnya kemitraan antara polisi dan masyarakat dalam menghadapi hiruk-pikuk permasalahan yang akan datang. Hal seperti inilah yang mengakibatkan ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi. Sekarang ini berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mereformasi diri menuju Polri yang mandiri, transparan, akuntabel dan dapat dipercaya. Sekarang Polri harus merubah diri dalam rangka untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat agar terbinanya hubungan harmonis antara polisi dan masyarakat.

¹ Penulis

² Pembimbing I

³ Pembimbing II

Memang tidak mudah membangun kembali kepercayaan masyarakat kepada polisi, semua itu memerlukan waktu dan usaha. Untuk membangun kepercayaan masyarakat, yang terlihat mudah dilakukan dari kalangan masyarakat kelas menengah ke atas.

Salah satu usaha yang dilakukan Polri sekarang ini adalah dengan menerapkan Model Perpolisian Masyarakat. Model Pemolisian Masyarakat yang juga dikenal dengan sebutan Polmas dalam PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2015, yang merupakan strategi baru perpolisian di Indonesia. Seluruh anggota Polri diharapkan dapat mendukung penerapan Polmas, dengan cara membangun serta membina kemitraan antara polisi dan masyarakat dengan mengedepankan sikap proaktif dan berorientasi pada pemecahan masalah. Polisi harus bersikap proaktif terhadap masyarakat dengan tidak lagi memandang masyarakat yang bersifat pasif tetapi dipandang sebagai mitra guna mencegah dan menangani kejahatan. Polmas pada dasarnya dilaksanakan oleh seluruh anggota Polri mulai dari yang bawah sampai pucuk pimpinan tertinggi Polri, dengan bentuk kegiatan disesuaikan dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Salah satunya seperti pembinaan yang dilakukan oleh fungsi teknis kepolisian yang diterapkan oleh petugas bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan lalu disebut dengan BHABINKAMTIBMAS dalam membina siskamling. Sehubungan dengan hal tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas penerapan polmas yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas dalam pembinaan siskamling.

Untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban di masyarakat memang perlu ada koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain pemerintah, instansi samping (TNI) dan pihak Kepolisian yang punya wewenang sangat besar dalam memberikan perlindungan, pengangoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tak kalah pentingnya adalah partisipasi masyarakat itu sendiri. Hal itu bisa terwujud apabila Polri terutama Bhabinkamtibmas turun langsung kemasyarakat sehingga peranan

Bhabinkamtibmas betul-betul dapat dirasakan dan mampu meningkatkan pelayanan masyarakat. Pelaksanaan Bhabinkamtibmas yang tujuannya untuk mengupayakan terwujudnya situasi kamtip yang mantap dan dinamis akan berpengaruh terhadap lingkungan masyarakat, baik berpengaruh yang positif maupun negatif. Hal ini disebabkan karena setiap masyarakat mempunyai penilaian yang berbeda-beda terhadap kegiatan Bhabinkamtibmas khususnya dan polisi untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dimasyarakat memang perlu adanya koordinasi dan partisipasi dari semua pihak antara lain, Pemerintah, TNI dan pihak Kepolisian yang mempunyai wewenang sangat besar dalam memberi perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

Jadi, disini Bhabinkamtibmas dituntut untuk melakukan perannya sebagai pimpinan di polsek untuk meningkatkan pelayanan keamanan di Desa Sumoroto oleh anggota Bhabinkamtibmas Polsek Sumoroto agar menjadikan lingkungan keamanan yang lebih baik. Rumusan masalah penelitian ini yaitu :

“Bagaimana peranan bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat dalam meningkatkan pelayanan keamanan di Polsek Sumoroto Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo?”

Metode Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:35) “metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan antara variable satu dengan yang lain.

Menurut Sugiyono (2012:13) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna generalisasi.

Lokasi penelitian yang dipilih

peneliti adalah di Polsek Sumoroto Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo, lokasi tersebut dipilih dengan alasan yang menarik untuk diteliti yaitu peranan Bhabinkamtibmas dalam meningkatkan pelayanan keamanan di Polsek Sumoroto Desa Sumoroto Kabupaten Ponorogo

Dalam penelitian ini, penulis menentukan dengan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2012:12:216): (1) Kanit (Kepala Unit) Bhabinkamtibmas Sumoroto, Aiptu.Sujarno selaku Kanit BHABINKAMTIBMAS Polsek Sumoroto: (2) Anggota Bhabinkamtibmas

Teknik pengumpulan data dan Sumber data dari penelitian ini diperoleh secara langsung dari hasil wawancara terhadap anggota Bhabinkamtibmas dan masyarakat yang dikategorikan sebagai data primer.

Data primer didapatkan dari hasil wawancara: (1) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Moleong Lexy (2004:186); (2) Dokumentasi adalah kumpulan dari dokumen-dokumen dapat memberikan keterangan atau bukti yang berkaitan dengan proses pengumpulan dan pengelolaan dokumen secara sistematis serta menyebar luaskan kepada pemakai informasi tersebut.

Sedangkan data sekunder diperoleh dengan mempelajari buku-buku/literatur, majalah, dokumen, artikel, internet dan tulisan para sarjana yang berkaitan dengan penelitian ini, dalam penelitian ini dengan melakukan pengamatan terlibat, wawancara, dan pemeriksaan dokumen.

Pengamatan adalah aktivitas yang dilakukan terhadap proses atau suatu objek dengan tujuan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan fenomena dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

Pengamatan terlibat yang akan dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan terhadap petugas Bhabinkamtibmas yang melakukan interaksi dengan individu atau kelompok masyarakat. Selain itu, penulis melibatkan diri pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan petugas Bhabinkamtibmas bersama masyarakat, sehingga diketahui peran petugas Bhabinkamtibmas dan diketahui

partisipasi masyarakat dalam implementasi perpolisian masyarakat.

Peneliti ini menggunakan triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Dimana dalam pengertiannya triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian (Moloeng, 2012:330)

Data yang telah terkumpul pada penelitian ini akan dianalisis menggunakan analisis deskriptif dengan model analisis data menurut Miles dan Huberman. Dengan demikian, proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead*, yakni suatu peranan yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Bhabinkamtibmas yang melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan tujuan penyelesaian persoalan di dalam masyarakat, untuk peningkatan pelayanan keamanan anggota Bhabinkamtibmas untuk mewakili organisasinya memberikan pelayanan kepada masyarakat: **Pertama**, Melaksanakan kunjungan/sambang kepada masyarakat. Pelaksanaan kegiatan kunjungan/sambang kepada masyarakat anggota Bhabinkamtibmas datang di waktu ada permasalahan dan perselisian antar warga desa, tidak setiap hari datang berkunjung dengan kata lain hanya 1 minggu sekali. Akan tetapi untuk menjalin silaturahmi yang baik dengan anggota Bhabinkamtibmas sering datang berkunjung jika ada permasalahan yang berat mencari jalan tengah agar permasalahan antar warga cepat terselesaikan.

Kedua, Menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri. Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang kebijakan pimpinan Polri berkaitan dengan Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Harkamtibmas) telah diterima oleh masyarakat dengan baik, informasi yang tidak sekedar diterima tapi dilaksanakan oleh masyarakat.

Ketiga, Mendorong pelaksanaan

siskamling dalam pengamanan lingkungan di kegiatan masyarakat. Bhabinkamtibmas sebagai *figurhead* yaitu mewakili organisasi yang dipimpinnya di dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi di dalam BHABINKAMTIBMAS sudah melakukannya dengan baik mengatasi persoalan di desa, membangun siskamling dengan sasaran pemuda desa sebagai pendorong adanya situasi yang tertib dan aman. Bekerjasama baik dengan masyarakat untuk menyebarkan informasi penting sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat desa.

Peranan Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*). Peranan ini manajer bertindak sebagai pemimpin, Ia melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Untuk disandingkan dengan peningkatan pelayanan keamanan masyarakat Bhabinkamtibmas melakukan tindakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi dan motivasi kepada masyarakat: (1) Melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat. Kegiatan melaksanakan konsultasi, mediasi, negosiasi, fasilitasi, motivasi kepada masyarakat dalam Harkamtibmas dan pemecahan masalah kejahatan dan sosial sudah mulai sesuai aturan atau tupoksi Bhabinkamtibmas, kalangan masyarakat tua, muda, bapak-bapak maupun ibu-ibu yang mempunyai dan bermasalah ke lingkungan atau warga masyarakat lainnya dapat segera terselesaikan karena mediasi; (2) Mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya. Kegiatan mengkoordinasikan upaya pembinaan Kamtibmas dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya sudah lebih baik. Anggota Bhabinkamtibmas diterima di semua kalangan masyarakat untuk bekerjasama ataupun berkoordinasi dalam peningkatan pelayanan keamanan masyarakat; (3) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat yang memerlukan. Bhabinkamtibmas pemimpin (*leader*) memimpin di desa untuk kegiatan meningkatkan pelayanan keamanan yang

berupa pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli sudah baik kendalanya dengan kegiatan peningkatan pelayanan pada di pelayanan yang kurang maksimal dalam menganani keluhan masyarakat, melakukan hubungan interpersonal dengan yang dipimpin, dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya diantaranya memimpin, memotivasi, mengembangkan, dan mengendalikan. Pendekatan yang sekaligus melakukan kegiatan motivasi kepada masyarakat agar membantu meningkatkan keamanan lingkungan.

Peranan BHABINKAMTIBMAS sebagai pejabat perantara (*liasion manager*). Peranan sebagai pejabat perantara (*liasion manager*), disini manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya: **Pertama**, Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas. Membimbing dan menyuluh dibidang hukum dan Kamtibmas di desa Sumoroto sudah melakukan pendekatan dengan masyarakat karena pelaksanaan tugas tersebut sangatlah penting, jika desa aman dan tertib permasalahan pun akan jarang terjadi selain itu kita akan mudah berkoordinasi dengan masyarakat untuk mengajak masyarakat lainnya yang tidak mau untuk berkoordinasi dalam membantu bimbingan dan penyuluhan.

Kedua, Menggerakkan kegiatan masyarakat yang bersifat positif. Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara (*liasion manager*) sudah menjalankannya dengan baik manajer melakukan peranan yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar organisasinya. Berinteraksi dengan masyarakat agar untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat.

Meningkatkan pelayanan keamanan kepada masyarakat pada intinya yaitu tentang pelindung dan pengayom masyarakat, maka polri khususnya Bhabinkamtibmas harus berusaha mewujudkan situasi aman dan tertib dalam masyarakat. Untuk itu polri perlu melakukan upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya gangguan kamtibmas, sehingga masyarakat dapat merasa aman dan terayomi, Selain kegiatan tersebut di atas, polri juga perlu memberikan pemahaman yang baik tentang pentingnya peran serta masyarakat dalam turut

menciptakan situasi kamtibmas di wilayahnya, yaitu dengan pelaksanaan siskamswakarsa atau sistim keamanan lingkungan dan diharapkan masyarakat mau untuk turut serta melakukan upaya pencegahan di wilayahnya bersama-sama dengan Polri, setiap pelanggaran yang timbul secara tegas, agar masyarakat mengetahui bahwa setiap tindakan yang melanggar ketentuan perundang-undangan akan mendapat sanksi. Dengan demikian diharapkan masyarakat akan semakin mengerti tentang pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku dan menimbulkan efek jera bagi setiap pelanggar hukum.

Penutup

Bhabinkamtibmas sebagai *Figurehead* memberikan arahan kepada anggotanya untuk dekat masyarakat dan aktif di segala kegiatan di desa agar menjaga kepercayaan ke masyarakat, menyambung silaturahmi, tidak adanya jarak antara anggota Bhabinkamtibmas. Arahan yang diberikan yaitu tentang memimpin di lingkungan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan di desa, tetapi masih ada kekurangan tentang kunjungan Bhabinkamtibmas yang tidak dilaksanakan setiap hari.

Bhabinkamtibmas sebagai pemimpin (*leader*), mewakili organisasi bertugas, pokok, fungsi dan tujuan kepada masyarakat. Modal kepercayaan dan kedekatan dengan masyarakat anggota bisa melaksanakan segala tugas-tugasnya dan kewajiban masyarakatpun bisa mendapatkan pelayanan dari Bhabinkamtibmas. Akan tetapi masih ada anggota yang kurang fokus menjalankan tugasnya kepada masyarakat yaitu tentang sambang/kunjungan.

Bhabinkamtibmas sebagai pejabat perantara (*liasion manager*) menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar menjadikan situasi yang mantap dan dinamis di lingkungan masyarakat. Kekurangan pada pelayanan keamanan kepada masyarakat yang kurang maksimal dan memuaskan akan selalu dibenahi. Masyarakat yang tidak bisa diajak berkerjasama

Guna kepentingan peningkatan peranan Bhabinkamtibmas serta peningkatan pelayan keamanan masyarakat yang mantap dan dinamis, berdasarkan pada simpulan di atas, pada kesempatan ini penulis memberikan sedikit masukan berupa

rekomendasi atau saran sebagai berikut: (1) Bhabinkamtibmas sebaiknya selalu meningkatkan pelayanan keamanan dari segi kunjungan; (2) Selalu mendengarkan keluhan tentang pelayanan keamanan kepada masyarakat; (3) Menyebarkan informasi agar semua kalangan dilingkungan masyarakat untuk mendapatkan informasi yang diberikan; dan (3) Kegiatan yang bersifat positif untuk semakin dirutinkan.

Daftar Pustaka

- F., Rocmadi. 1994. *Publik Relation dalam teori dan Praktek*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Kepolisiran Negara Republik Indonesia, Skep/737/X/2005
- Miftah, Toha. 2014. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*: UGM JOGJAKARTA
- Muradi. Juli 2010. *Polmas Sebagai Strategi Partnership*. Bandung : UNPAD
- Moleong, lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Nasution, Prof. Dr. S. 2003. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung : Tarsito.
- Sugiyono, Dr. 2012. *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Penerbit ALFABET
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif dan kualitatif, R&D*
- Soekanto Soerjono, 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Penerbit PT RAJAGRAFINDO PERSADA
- Wijaya, Muhidin Laksana. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sumber lainnya:**
- Buku Pintar BHABINKAMTIBMAS SOP (Standat Operasional Prosedur) Bhabinkamtibmas
- Perkap No. 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat.
- <http://www.polresponorogo.com/> (diakses pada tanggal 20 September 2015)
- <http://www.polresponorogo.com/id/2015/05/27/tugas-dan-fungsi-bhabinkamtibmas/> (diakses pada tanggal 20 September 2015)
- Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002.